

4. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Perusahaan

Latar belakang berdirinya perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain pastilah berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan di dalam bidang yang ditangani antara sebuah perusahaan dengan perusahaan yang lain. Awal mula berdirinya perusahaan ini adalah karena adanya kesepakatan dan persetujuan bersama oleh para pendiri untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas dengan anggaran dasar yang semuanya termuat dalam akte pendirian.

Perusahaan ini sebut saja dengan PT. “X” merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi khususnya dalam bidang perdagangan, pembangunan teknik, industri, pertanian, pengangkutan, pertambangan, percetakan dan jasa.

PT. “X” sendiri didirikan oleh para pendirinya pada tahun 1999 dan berkedudukan di Kotamadya Surabaya. Motivasi didirikannya perusahaan ini adalah karena pada saat itu para pendiri perusahaan melihat adanya peluang yang menjanjikan di masa yang akan datang karena pangsa pasar yang ditawarkan usaha ini sangat besar, dan pada saat itu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ini belum cukup banyak sehingga permintaan di bidang ini cukup besar.

Menurut Badan Sertifikasi Jawa Timur, PT. “X” termasuk perusahaan konstruksi dengan kualifikasi M2 (menengah), yang dijelaskan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan dalam mengerjakan proyek-proyek konstruksi yang mempunyai nilai kontrak sebesar lebih dari Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 3 miliar.

4.1.2 Lokasi Perusahaan

Keputusan untuk memilih lokasi suatu perusahaan merupakan salahsatu keputusan yang sangat penting karena hal tersebut menyangkut tumbuh kembang

perusahaan. Penempatan suatu lokasi perusahaan mempunyai efek yang penting bagi sukses tidaknya operasi perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu dibutuhkan adanya pertimbangan-pertimbangan yang teliti dan terarah.

Adapun alasan dipilihnya lokasi perusahaan yang letaknya berada di kawasan pertokoan :

1. Dekat dengan tenaga kerja
2. Dekat dengan transportasi
3. Fasilitas listrik, air, dan telpon yang memadai.
4. Fasilitas parkir yang memadai

4.1.3 Tujuan Perusahaan

Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya mempunyai tujuan yang sama dengan perusahaan lain yaitu mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan biaya seminimal mungkin. Atau dengan kata lain merupakan investasi untuk memperoleh berbagai macam manfaat yang cukup layak dikemudian hari, dan manfaat tadi dapat berupa manfaat keuangan (laba) dan manfaat non keuangan (pendayagunaan bahan baku dalam negeri yang melimpah).

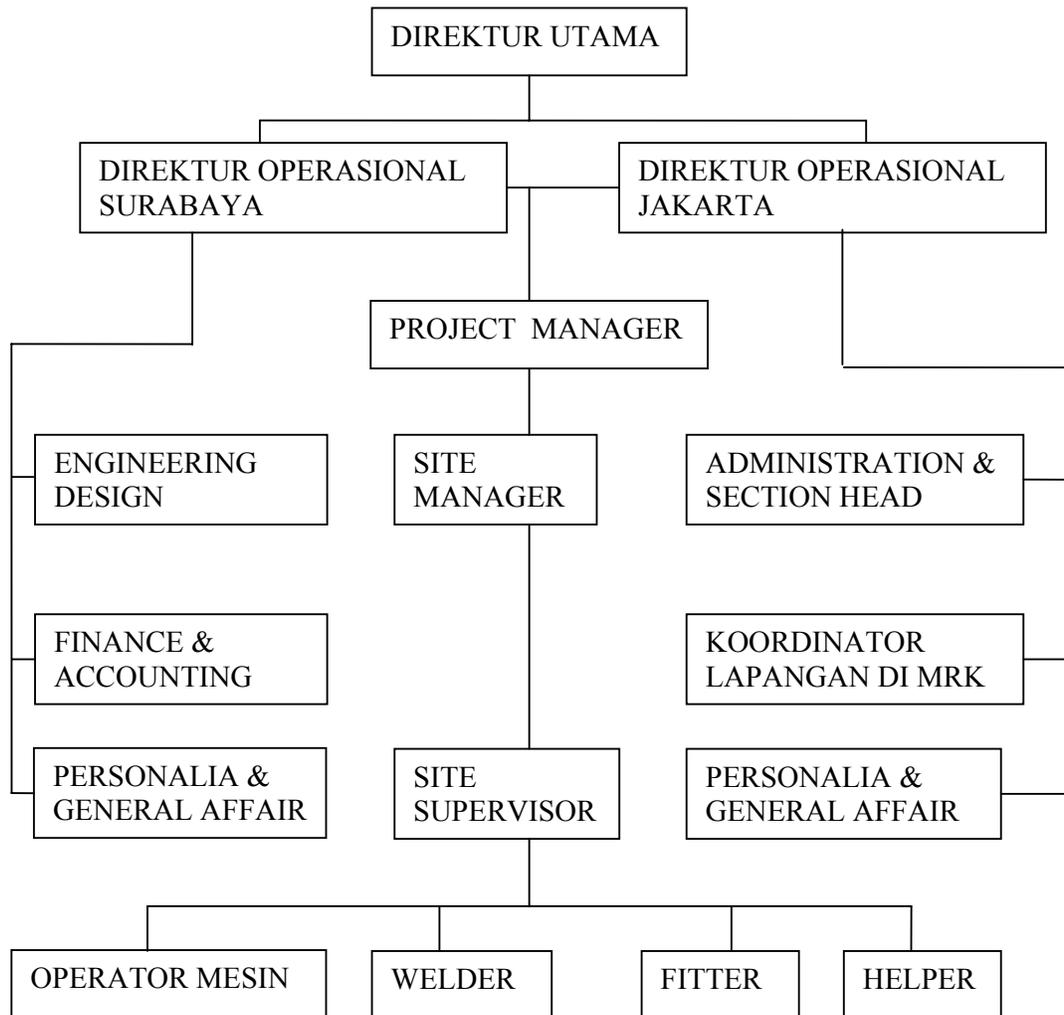
4.1.4 Struktur Organisasi dan *Job Description*

Struktur organisasi merupakan gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam suatu perusahaan atau badan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan.

Pentingnya peranan organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen harus dikaitkan dengan kemampuan manusia di dalam organisasi yang bersangkutan. Bergerak tidaknya suatu organisasi ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sangat bergantung akan kemampuan manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Untuk itu perlu adanya suatu susunan yang jelas mengenai suatu organisasi.

Adapun struktur organisasi pada PT. "X" adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DI PT.X



Sumber : Intern Perusahaan

Adapun penjelasan *job description* dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. **Direktur Utama**

Merupakan pemimpin proyek yang tidak lain adalah wakil dari pemilik, yang tugasnya adalah memberikan pengarahan kepada Direktur Operasional/ Manajer Konstruksi sesuai dengan Kerangka Acuan Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi serta mengontrol apakah Direktur Operasional sudah memenuhi tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Direktur Utama bertanggungjawab kepada pemilik.

2. **Direktur Operasional**

Tugasnya memberikan pengarahan kepada bawahannya dalam hal cara-cara memonitor pelaksanaan proyek, serta mengontrol dan mengendalikan apakah kontraktor atau bawahannya sudah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) serta jadwal-jadwal yang telah disetujui bersama.

3. ***Project Manager***

Sebagai pemimpin pelaksanaan proyek memberikan pengarahan kepada bawahannya, mengenai bagaimana mereka dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu, biaya yang dianggarkan dan kualitas serta kuantitas sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan. Selain itu ia juga bertugas mengelola proyek dari tahapan konseptual sampai selesai. Tugasnya yang lain adalah memelihara kerjasama yang erat dengan pimpinan proyek agar dapat menyelesaikan proyek dengan baik. Seorang *Project Manager* harus mampu menginterpretasikan gambar-gambar, spesifikasi dan kondisi umum dari kontrak secara baik dan tidak berat sebelah. Semua test-test di lapangan dan inspeksi kualitas merupakan tugasnya dibantu dengan staffnya. *Project Manager* bertanggung jawab kepada *Top Management* karena ia memiliki wewenang dan otoritas yang cukup untuk mengemban tugasnya sebagai wakil pemilik proyek di lapangan.

4. ***Engineering Design***

Bertugas membuat :

- Rencana tapak dan rancang bangun

- Rencana, penjadwalan dan pengontrolan proyek
- Kontrol kualitas dan pengujiannya
- Injiniring Lapangan
- Pematokan dan pengukuran
- Permintaan pembayaran termin

5. *Site Manager*

Merupakan bagian perencanaan yang bertugas membuat :

- Laporan kemajuan fisik proyek (*progress report*)
- Jadwal pelaksanaan (*contruction schedule*)
- Pekerjaan tambah-kurang dan keterlambatan

6. *Administration and Section Head*

Tugas administrasi yaitu mencatat, menyimpan dan mengelola segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan proyek. Dengan kata lain mengelola informasi proyek terutama yang menyangkut masalah finansial, data-data lapangan sebagai dasar permintaan angsuran pembayaran dan dokumen-dokumen lain yang penting yang dapat mempengaruhi hubungan kontrak antara klien, kontraktor dan pihak ketiga.

Tugas Kepala Seksi yaitu :

- Menyajikan laporan evaluasi prestasi pekerjaan lapangan secara berkala dan biaya yang terpakai.
- Membuat estimasi biaya.
- Mengelola buku laporan harian proyek yang harus diisi tiap hari oleh koordinator lapangan.
- Pembuatan permintaan pembayaran termin.
- Pembuatan gambar detil Rancang Bangun.
- Membuat *as-built drawing*, bekerjasama dengan pihak pemilik.

7. *Finance and Accounting*

Tugasnya adalah membuat atau mencatat pengelolaan keuangan proyek, menyiapkan daftar gaji, melaksanakan tertib administrasi perkantoran proyek dan pekerjaan-pekerjaan administrasi yang lain seperti mengatur pangadaan dana dan mengalokasikannya.

8. Koordinator Lapangan

Bertugas melaksanakan pengukuran di lapangan, pengujian bahan, pengukuran volume bahan dan pekerjaan, inspeksi lapangan dan pengawasan.

9. *Personalia and General Affair*

Tugasnya mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan kepegawaian dan mengurus masalah-masalah umum.

10. *Site Supervisor*

Bertugas melakukan pengawasan secara langsung terhadap tenaga kerja di lapangan, pemakaian peralatan kerja dan bahan, pembagian pekerjaan antar kelompok kerja, memecat, dan memperkerjakan seseorang dalam kelompok kerja tertentu dan kualitas dari pekerjaan konstruksi.

11. Operator Mesin

Tugasnya mengoperasikan atau menjalankan mesin-mesin yang dipergunakan dalam proyek.

12. *Welder*

Tugasnya adalah mengelas pipa-pipa yang bocor atau mengelas segala sesuatu yang dilakukan dalam kegiatan suatu proyek.

13. *Fitter*

Tugasnya membantu koordinator lapangan dalam pengukuran ataupun pemasangan yang terjadi di lapangan.

14. *Helper*

Bertugas membantu mengambilkan peralatan dan bahan-bahan yang dipakai di lapangan.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Kebijakan Akuntansi Perusahaan Untuk Jasa Konstruksi

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan untuk usaha jasa konstruksi yang mencakup pada pengakuan pendapatan dan beban adalah penjualan yang bersifat *job order* dengan ketentuan sebagai berikut :

- Kontrak yang bernilai diatas atau lebih dari Rp. 100.000.000 berdasarkan metode prosentase penyelesaian dimana tahap penyelesaian dihitung berdasarkan *progress phisik* pada tanggal neraca, berdasarkan berita acara

penyerahan yang siap difakturkan serta pekerjaan lapangan dan jasa berdasarkan berita acara yang telah ditandatangani oleh pemesan.

Dalam pencatatan atas pendapatan dan biaya PT. "X" menganut sistem *accrual basis*, dimana pendapatan dan biaya diakui atau dicatat terlebih dahulu setelah terjadinya penyerahan atas jasa konstruksi, walaupun pembayaran belum diterima. Setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan telah dilakukan pencatatan, pengikhtisaran dan penyajian dalam suatu laporan sesuai dengan Standar Akuntansi pada umumnya. Pencatatan setiap transaksi keuangan dilakukan di dalam buku harian, jurnal, dan buku besar berdasarkan bukti-bukti transaksi yang ada. Selain itu perusahaan juga menerapkan adanya pencatatan untuk proyek yang dikerjakan melalui Laporan Administrasi Proyek. Laporan ini berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelian bahan, pembayaran tenaga kerja, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya.

Adapun buku harian dan catatan akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan :

1. Buku Harian Kas

Buku ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran kas secara tunai. Buku harian kas hanya bersifat untuk mencukupi kebutuhan rutinitas yang jumlahnya tidak terlalu besar. Penerimaan kas perusahaan meliputi: pengambilan dana / uang tunai dari bank, penerimaan tunai dari pendapatan proyek, dan lain-lain. Sementara itu pengeluaran kas antara lain meliputi: biaya administrasi, biaya operasional, dan biaya umum perusahaan lainnya yang pembayarannya dilakukan secara tunai.

2. Buku Harian Bank

Buku ini hanya khusus digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran perusahaan yang melalui bank. Penerimaan melalui bank meliputi : pendapatan yang diperoleh dari pemberi kerja atas penyerahan jasa konstruksi, dll. Sedangkan pengeluaran melalui bank yaitu pembayaran kepada supplier atas pembelian bahan dalam jumlah yang besar. Buku ini sangat berguna untuk mengadakan pencocokan atau rekonsiliasi antara saldo rekening pada buku harian bank dengan saldo rekening koran.

3. Jurnal

Pencatatan jurnal transaksi atas usaha jasa konstruksi perusahaan dikelompokan sebagai berikut:

- Jurnal Penerimaan kas
 - Jurnal Pembelian
 - Jurnal Pengeluaran Kas
 - Jurnal Penjualan
 - Jurnal Umum
4. Buku Besar

Buku besar ini terdiri dari beberapa rekening transaksi yang berguna untuk menunjukkan saldo akhir pada tiap-tiap rekening. Biasanya semua catatan transaksi yang telah dijurnal untuk selanjutnya diposting ke dalam buku besar.

5. Laporan Administrasi Proyek

Laporan ini digunakan untuk mencatat prosedur yang harus dikerjakan dalam suatu proyek konstruksi, tahapan-tahapan pekerjaan, batas waktu penyelesaian dalam periode berjalan, bahan-bahan material yang dibutuhkan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pengerjaan dan kemajuan suatu proyek baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu juga berguna untuk mencatat buku provisi atau biaya *entertainment* yang tidak dianggarkan. Laporan ini dibuat oleh koordinator lapangan yang kemudian didistribusikan ke pihak-pihak lain yang terkait untuk ditindaklanjuti.

6. Neraca Saldo dan Laporan Keuangan

Setelah selesai melewati tahapan-tahapan diatas, pada akhirnya catatan akuntansi ditutup dengan merekap semua pos atau rekening pada buku besar untuk disusun menjadi sebuah neraca saldo dan laporan keuangan perusahaan pada akhir tahun buku atau pada akhir bulan Desember dan pada setiap penyelesaian proyek, karena perusahaan menggunakan tahun takwim. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari laporan Laba Rugi, Neraca, Laporan Perubahan Modal. Penyusunan Laporan Laba Rugi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang telah didapat oleh perusahaan yang nantinya akan dijadikan acuan penilaian terhadap prestasi kinerja perusahaan dan dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang, misalnya untuk menentukan estimasi anggaran atas sebuah tawaran

proyek konstruksi berikutnya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 dan tabel 4.4. Penyusunan Neraca dimaksudkan untuk mengetahui posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada saat tertentu, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5 dan tabel 4.6, sedangkan Laporan Perubahan Modal dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui seberapa besar penambahan modal yang terjadi dan digunakan sebagai dasar pertimbangan atas rencana ekspansi usaha perusahaan dari laba yang diperoleh.

4.2.2 Gambaran Kondisi Perusahaan

Dalam pelaksanaan proyek, perusahaan terikat dengan persyaratan yang termuat dalam kontrak perjanjian kerja yang telah disetujui oleh kedua belah pihak perusahaan dan pihak pemberi kerja. Kontrak perjanjian tersebut mengatur tentang segala hal dalam pelaksanaan kontrak atau proyek antara lain jenis pekerjaan yang dilaksanakan, jangka waktu pekerjaan, nilai kontrak yang disetujui, pembayaran kemajuan kontrak konstruksi (*payment*) dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan pekerjaan.

Pada waktu pelaksanaan proyek berlangsung, PT “X” sebagai kontraktor menentukan tingkat persentase penyelesaian atau progress berdasarkan kemajuan prestasi fisik yang ditentukan dengan menggunakan metode biaya terhadap biaya. Penilaian ini dilakukan oleh orang-orang teknik di lapangan, karena orang-orang teknik tersebut yang mengetahui seberapa persen kemajuan pekerjaan proyek menuju tercapainya penyelesaian. Persentase kontrak konstruksi atau termin akan menjadi dasar penagihan ke pemberi kerja untuk pembayaran atas prestasi kemajuan fisik yang telah tercapai. Sedangkan progress fisik akan menjadi dasar pengakuan pendapatan perusahaan.

Dalam penyelesaian suatu proyek jika prestasi pekerjaan yang dicapai tidak sesuai dengan termin waktu yang disepakati dalam kontrak atau yang direncanakan, maka PT. “X” dalam menilai prestasi kerjanya didasarkan atas prestasi fisik yang telah dihasilkan dan PT.”X” akan memperlakukan sebagai penagihan dalam proses.

Seperti yang disebut diatas, bahwa besarnya pendapatan yang diakui oleh perusahaan didasarkan atas penilaian prestasi fisik dengan menggunakan metode

biaya terhadap biaya, maka PT. "X" sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut berhak untuk menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Penagihan atas kemajuan kontrak tersebut akan dibukukan dalam perkiraan piutang proyek. Selain itu pihak perusahaan memungut pajak dari pemberi kerja yaitu PPN sebesar 10% dari total pembayaran piutang proyek dan atas penerimaan uang muka (kalau ada). Perusahaan mengeluarkan PPh sebesar 2% dari setiap pelunasan piutang proyek dan penerimaan uang muka (kalau ada) dan retensi (kalau ada)

4.2.2 Deskripsi Data Proyek Perusahaan

PT. "X" terdiri dari beberapa lini atau divisi usaha yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bidang usaha yaitu usaha perdagangan dan usaha jasa konstruksi.

Pada tahun 2002, PT."X" menerima proyek kontrak konstruksi dengan nama Proyek HDPE milik pelanggan bernama PT. Sanko, yang mempunyai Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.001.960.000,00.

Metode yang digunakan oleh PT."X" adalah metode persentase penyelesaian dengan pendekatan progress fisik dengan menggunakan metode biaya terhadap biaya. Dalam pencatatannya PT "X" secara akuntansi dan perpajakan menganut *accrual basis*. Adapun pencatatan PT. "X" pada tahun 2002 dengan menggunakan metode persentase penyelesaian adalah sebagai berikut :

PT. Sanko

Nilai Kontrak Rp. 2.001.960.000,00

Jangka Waktu Penyelesaian 2 (dua) tahun (2002-2003)

Tabel 4.2

Tabel Penerapan Metode Persentase Penyelesaian

Termin	2002			2003	Total
	I 20%	II 20%	III 30%	IV 30%	
Nilai Kontrak	400.392.000	400.392.000	600.588.000	600.588.000	2.001.960.000

Biaya Aktual	421.804.640	473.454.000	270.093.000	292.352.000	1.457.703.640
Biaya Sampai saat ini	421.804.640	895.258.640	1165.351.640	1.457.703.640	1.457.703.640
Progress	29%	61%	80%	100%	

Termin yang disetujui oleh pemilik proyek adalah termin I 20%, termin II 20%, termin III 30 %, dan termin IV 30%.

Pencatatan dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian adalah sebagai berikut :

Tahun 2002

Termin I

Jurnal Saat Kontrak Konstruksi Ditandatangani

Tidak ada jurnal

Pengeluaran Biaya Proyek

Jumlah biaya proyek yang terjadi pada termin I sebesar Rp. 421.804.640

Jurnal :

PDP	Rp. 421.804.640
Kas	Rp. 421.804.640

Akun PDP (Pembangunan Dalam Proses) yang dicatat merupakan aktiva lancar yang dilaporkan ke dalam Neraca Tahun Berjalan.

Penagihan Proyek Termin I

Termin I yang disetujui oleh pemilik proyek sebesar 20 %.

Jumlah Penagihan:

Termin I	20% x Rp. 2.001.960.000	Rp.400.392.000
PPN	10% x Rp. 400.392.000	<u>Rp. 40.039.200</u>
		Rp.440.431.200
PPh pasal 23	2% x Rp.400.392.000	Rp. 8.007.840

Jurnal :

Piutang Proyek	Rp.440.431.200
Penagihan Proyek Dalam Proses	Rp.400.392.000
PPN Keluaran	Rp. 40.039.200

Akun Piutang Proyek disisi debet diperlakukan sebagai Aktiva Lancar dan dilaporkan ke dalam Neraca Tahun Berjalan. Akun Penagihan Proyek Dalam Proses disisi kredit masuk ke dalam akun Kewajiban Lancar dan dilaporkan kedalam Neraca Tahun Berjalan. Akun PPN Keluaran yang dicatat diperlakukan sebagai utang, karena merupakan utang kepada negara dan dilaporkan ke dalam Neraca Tahun Berjalan, masuk kedalam akun Kewajiban (*Liabilities*) termasuk dalam Hutang Pajak. Namun PPN yang dicatat ini nantinya akan hilang karena pada setiap akhir bulan untuk masa pajak yang bersangkutan Wajib Pajak akan membandingkan antara PPN Keluaran dan PPN Masukan, kemudian mengisi SPT untuk masa pajak yang bersangkutan. Untuk Menutup perkiraan PPN, Wajib Pajak perlu membuat jurnal sebagai berikut:

Akun	Debet	Kredit
PPN Keluaran	XX	
PPN Masukan		XX
PPN yang masih harus dibayar		XX

Akun PPN yang masih harus dibayar inilah yang nantinya diperlakukan sebagai utang, karena merupakan utang kepada negara, dilaporkan ke dalam Neraca pada Tahun Berjalan, masuk dalam akun Kewajiban (*Liabilities*) termasuk dalam Hutang Pajak dan Akun ini akan hilang pada saat terjadi pelunasan PPN Kurang Bayar.

Pada saat Pelunasan Termin I

Jurnal :

Bank/Kas	Rp. 432.423.360
PPh ps 23	Rp. 8.007.840
Piutang Proyek	Rp. 440.431.200

Akun PPh pasal 23 ini dicatat sebagai uang muka pajak/PPh pasal 23 dibayar dimuka dan dilaporkan ke dalam Neraca pada tahun Berjalan. Akan tetapi PPh pasal 23 ini pada akhir tahun akan menjadi kredit pajak dan dikreditkan dengan

PPh Badan. Oleh karena itu segera setelah diketahui jumlah PPh Badan Terutang maka perusahaan mencatat sebagai berikut :

Akun	Debet	Kredit
Utang PPh Badan	XX	
PPh pasal 23		XX
PPh pasal 25		XX
PPh Kurang Bayar		XX

PPh Kurang Bayar inilah yang nantinya dicatat sebagai Hutang Pajak pada akhir tahun dan dilaporkan dalam Neraca Tahun Berjalan termasuk dalam akun Kewajiban (*Liabilities*). Akun Piutang Proyek disisi kredit diperlakukan sebagai pengurang Aktiva Lancar dan dilaporkan ke dalam Neraca Tahun Berjalan.

Pengakuan pendapatan dan laba laba kotor

Pendapatan yang diakui termin I:

Progress 29% x Rp. 2.001.960.000 Rp.580.568.400

HPP yang diakui termin I :

Progress 29% x Rp.1.457.703.640 Rp.421.804.640

Jurnal :

PDP	Rp. 158.763.760
HPP	Rp. 421.804.640
Pendapatan	Rp.580.568.400

Akun PDP yang dicatat dalam jurnal diatas merupakan laba kotor perusahaan, yang didapat dari selisih antara Pendapatan dan HPP. Ketiga akun diatas akan dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi Perusahaan pada akhir tahun bersama dengan pendapatan, HPP dan laba kotor dari proyek lainnya.

Termin II

Pengeluaran Biaya Proyek

Jumlah biaya proyek yang terjadi pada termin II sebesar Rp. 473.454.000

Jurnal :

PDP	Rp. 473.454.000
-----	-----------------

Kas Rp. 473.454.000

Penagihan Proyek Termin II

Termin II yang disetujui oleh pemilik proyek sebesar 20 %.

Jumlah Penagihan:

Termin II	20% x Rp. 2.001.960.000	Rp.400.392.000
PPN	10% x Rp.400.392.000	<u>Rp. 40.039.200</u>
		Rp.440.431.200
PPh pasal 23	2% x Rp.400.392.000	Rp. 8.007.840

Jurnal :

Piutang Proyek	Rp.440.431.200
Penagihan Proyek Dalam Proses	Rp. 400.392.000
PPN Keluaran	Rp. 40.039.200

Pada saat Pelunasan Termin II

Jurnal :

Bank/Kas	Rp. 432.423.360
PPh ps 23	Rp. 8.007.840
Piutang Proyek	Rp. 440.431.200

Pengakuan pendapatan dan laba laba kotor

Pendapatan yang diakui termin II:

Progress	61% x Rp. 2.001.960.000	Rp.1.221.195.600
----------	-------------------------	------------------

Pendapatan yang diakui termin I:

Progress	29% x Rp. 2.001.960.000	<u>Rp.580.568.400</u>
		Rp.640.627.200

HPP yang diakui termin II :

Progress	61% x Rp.1.457.703.640	Rp.895.258.640
----------	------------------------	----------------

HPP yang diakui termin I :

Progress	29% x Rp.1.457.703.640	<u>Rp.421.804.640</u>
		Rp.473.454.000

Jurnal :

PDP	Rp. 167.173.200
HPP	Rp. 473.454.000
Pendapatan	Rp.640.627.200

Termin III

Pengeluaran Biaya Proyek

Jumlah biaya proyek yang terjadi pada termin III sebesar Rp. 270.093.000

Jurnal :

PDP	Rp. 270.093.000
Kas	Rp. 270.093.000

Penagihan Proyek Termin III

Termin III yang disetujui oleh pemilik proyek sebesar 30 %.

Jumlah Penagihan:

Termin III	30% x Rp. 2.001.960.000	Rp.600.588.000
PPN	10% x Rp.600.588.000	<u>Rp. 60.058.800</u>
		Rp. 660.646.800
PPh pasal 23	2% x Rp.600.588.000	Rp. 12.011.760

Jurnal :

Piutang Proyek	Rp.660.646.800
Penagihan Proyek Dalam Proses	Rp.600.588.000
PPN Keluaran	Rp. 60.058.800

Pada saat Pelunasan Termin III

Jurnal :

Bank/Kas	Rp. 648.635.040
PPh ps 23	Rp. 12.011.760
Piutang Proyek	Rp.660.646.800

Pengakuan pendapatan dan laba laba kotor

Pendapatan yang diakui termin III:

Progress	80% x Rp. 2.001.960.000	Rp.1.601.568.000
----------	-------------------------	------------------

Pendapatan yang diakui termin II:

Progress	61% x Rp. 2.001.960.000	<u>Rp.1.221.195.600</u>
		Rp.380.372.400

HPP yang diakui termin III :

Progress	80% x Rp.1.457.703.640	Rp.1.165.351.640
----------	------------------------	------------------

HPP yang diakui termin II :

Progress	61% x Rp.1.457.703.640	<u>Rp.895.258.640</u>
		Rp.270.093.000

Jurnal :

PDP	Rp. 110.279.400
HPP	Rp. 270.093.000
Pendapatan	Rp.380.372.400

Tahun 2003

Termin IV

Pengeluaran Biaya Proyek

Jumlah biaya proyek yang terjadi pada termin IV sebesar Rp. 292.352.000

Jurnal :

PDP	Rp. 292.352.000
Kas	Rp. 292.352.000

Penagihan Proyek Termin IV

Termin IV yang disetujui oleh pemilik proyek sebesar 30 %.

Jumlah Penagihan:

Termin IV	30% x Rp. 2.001.960.000	Rp.600.588.000
PPN	10% x Rp.600.588.000	<u>Rp. 60.058.800</u>
		Rp. 660.646.800
PPh pasal 23	2% x Rp.600.588.000	Rp.12.011.760

Jurnal :

Piutang Proyek	Rp.660.646.800
Penagihan Proyek Dalam Proses	Rp.600.588.000
PPN Keluaran	Rp. 60.058.800

Pada saat Pelunasan Termin IV

Jurnal :

Bank/Kas	Rp. 648.635.040
PPH ps 23	Rp. 12.011.760
Piutang Proyek	Rp. 660.646.800

Pengakuan pendapatan dan laba laba kotor

Pendapatan yang diakui termin IV:

Progress 100% x Rp. 2.001.960.000 Rp.2.001.960.000

Pendapatan yang diakui termin III:

Progress 80% x Rp. 2.001.960.000 Rp.1.601.568.000

Rp.400.392.000

HPP yang diakui termin IV :

Progress 100% x Rp.1.457.703.640 Rp.1.457.703.640

HPP yang diakui termin III :

Progress 80% x Rp.1.457.703.640 Rp.1.165.351.640

Rp.292.352.000

Jurnal :

PDP	Rp. 108.040.000
HPP	Rp. 292.352.000
Pendapatan	Rp.400.392.000

Jurnal untuk mencatat penyelesaian proyek

Penagihan Proyek Dalam Proses Rp.2.001.960.000

PDP Rp.2.001.960.000

Untuk lebih detailnya lihat tabel 4.3 dan 4.4. Pendapatan dan biaya dicatat terlebih dahulu setelah terjadinya penyerahan jasa konstruksi, walaupun pembayarannya belum terjadi karena perusahaan menganut sistem *accrual basis*. Penyusunan neraca dimaksudkan berguna untuk mengetahui posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada saat tertentu, lebih detailnya lihat tabel 4.5 dan tabel 4.6.

Tabel 4.3
PT "X"
Laporan Laba Rugi
Periode 1 Januari - 31 Desember 2002

Pendapatan Proyek	Rp.5.729.454.878	
HPP	Rp.4.693.586.321	
Laba Kotor		Rp.1.035.868.557
Beban Administrasi:		
Gaji dan THR	Rp.67.900.000	
Uang Lembur	Rp. 4.500.000	
Makan dan minum di kantor	Rp.13.861.000	
Bi. Administrasi	Rp. 82.000	
ATK	Rp. 584.300	
Bi. Pemeliharaan Kendaraan	Rp. 514.100	
Perjalanan Dinas	Rp. 7.416.000	
Beban Listrik, Air, Telpon	Rp.74.431.587	
PBB	Rp. 686.850	
Bi. Penyusutan	Rp.56.154.253	
Bi. Pemasaran	Rp.46.690.000	
Bi. Lain-lain	Rp. 2.555.000	Rp. 233.354.090
Laba Bersih Sebelum Pajak		<u>Rp. 802.514.467</u>

Sumber : data internal perusahaan

Tabel 4.4
PT "X"
Laporan Laba Rugi
Periode 1 Januari - 31 Desember 2003

Pendapatan Proyek	Rp.6.573.879.274	
HPP	Rp.5.380.029.748	
Laba Kotor		Rp.1.193.849.526
Beban Administrasi:		
Gaji dan THR	Rp.67.900.000	
Uang Lembur	Rp. 5.560.000	
Makan dan minum di kantor	Rp.14.540.000	
Bi. Administrasi	Rp. 125.000	
ATK	Rp. 350.000	
Bi. Pemeliharaan Kendaraan	Rp. 750.000	
Perjalanan Dinas	Rp. 7.320.000	
Beban Listrik, Air, Telpon	Rp.95.343.450	
PBB	Rp. 686.850	
Bi. Penyusutan	Rp.68.387.125	
Bi. Pemasaran	Rp. 5.100.000	
Bi. Lain-lain	Rp. 2.214.587	Rp. 268.277.012
Laba Bersih Sebelum Pajak		<u>Rp. 925.572.514</u>

Sumber : data internal perusahaan

Tabel 4.5
PT "X"
Neraca
Per 31 Desember 2002
(dalam rupiah)

<u>AKTIVA</u>		<u>KEWAJIBAN DAN MODAL</u>	
<u>Aktiva Lancar</u>		<u>Kewajiban Lancar</u>	
Kas	844.032.795	Penagihan Proyek	2.212.161.600
Bank	146.222.864	Dalam Proses	
Persediaan	118.302.475	Hutang Usaha	1.140.404.863
Piutang Usaha	413.150.338	Hutang Pajak	36.638.440
PDP	2.781.390.812		
Pajak Dibayar dimuka	5.750.250		
Total Aktiva Lancar	4.308.849.534	Tot. Kewjban Lancar	3.469.547.473
<u>Aktiva Tetap</u>		<u>Modal</u>	
Tanah	362.496.000	Modal Saham	500.000.000
Gedung	217.496.000	Laba Ditahan	382.248.706
Ak. Penystn Gedung	(17.218.428)	Laba Tahun Berjalan	764.497.414
Kendaraan	128.272.727		
Ak. Penystn Kendrn	(11.758.329)		
Inventaris Kantor	55.094.350		
Ak. Penystn Inv. Kntr.	(7.280.831)		
Total Aktiva Tetap	727.101.489	Total Modal	1.646.746.120
TOTAL AKTIVA	5.035.951.023	TOT KWJBN&MDL	5.035.951.023

Sumber : data internal perusahaan

Tabel 4.6
PT "X"
Neraca
Per 31 Desember 2003
(dalam rupiah)

<u>AKTIVA</u>		<u>KEWAJIBAN DAN MODAL</u>	
<u>Aktiva Lancar</u>		<u>Kewajiban Lancar</u>	
Kas	452.743.041	Penagihan Proyek	1.532.183.350
Bank	1.844.994.562	Dalam Proses	1.656.892.807
Persediaan	112.022.476	Hutang Usaha	43.615.475
Piutang Usaha	1.445.543.262	Hutang Pajak	
PDP	1.780.650.470		
Pajak Dibayar dimuka	28.152.416		
Total Aktiva Lancar	5.664.106.227	Tot. Kewjban Lancar	3.232.691.632
<u>Aktiva Tetap</u>		<u>Modal</u>	
Tanah	362.496.000	Modal Saham	1.500.000.000
Gedung	217.496.000	Laba Ditahan	764.497.414
Ak. Penystn Gedung	(28.093.244)	Laba Tahun	
Kendaraan	128.272.727	Berjalan	881.798.433
Ak. Penystn Kendrn	(24.585.597)		
Inventaris Kantor	75.003.650		
Ak. Penystn Inv. Kntr.	(15.708.304)		
Total Aktiva Tetap	714.881.252	Total Modal	3.146.295.847
TOTAL AKTIVA	6.378.987.479	TOT KWJBN&MDL	6.378.987.479

Sumber : data internal perusahaan

4.3 Analisa dan Pembahasan

4.3.1 Perhitungan Menggunakan Metode Persentase Penyelesaian menurut Penulis

PT “X” menggunakan metode persentase penyelesaian untuk mengakui pendapatannya, dengan menganut sistem *accrual basis* pada akuntansi dan perpajakannya, dimana pendapatan dan biaya dicatat terlebih dahulu setelah terjadi penyerahan jasa konstruksi, walaupun belum ada pembayaran.

Menurut PSAK No. 34 paragraph 23, pengakuan pendapatan dan beban yang memerhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian (*Percentage of Completion*). Menurut metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban, laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai luas aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode.

Dalam PSAK No.34 paragraph 28, dikatakan bahwa tahap penyelesaian suatu kontrak dapat ditentukan dalam berbagai cara. Perusahaan menggunakan metode yang mengukur secara andal pekerjaan yang dilakukan, tergantung pada sifat kontrak. Metode tersebut antara lain meliputi :

- a. Proporsi biaya kontrak untuk pekerjaan yang dilakukan sampai tanggal total biaya kontrak yang diestimasi;
- b. Survey atas pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- c. Penyelesaian suatu bagian secara fisik dari pekerjaan kontrak.

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan, maka saat ini akan dilakukan perbandingan antara metode persentase penyelesaian dengan menganut sistem *accrual basis* yang dipakai perusahaan dengan menurut penulis. Berikut ini adalah perinciannya :

PT. Sanko

Nilai Kontrak Rp. 2.001.960.000,00

Jangka Waktu Penyelesaian 2 (dua) tahun (2002-2003)

Termin yang disetujui oleh pemilik proyek adalah termin I 20%, termin II 20%, termin III 30 %, dan termin IV 30%.

Pencatatan dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian dengan sistem *accrual basis* menurut penulis adalah sebagai berikut :

Tahun 2002**Termin I**Jurnal Saat Kontrak Konstruksi Ditandatangani

Sesuai dengan pencatatan yang dilakukan perusahaan.

Pengeluaran Biaya Proyek

Sesuai dengan pencatatan yang dilakukan perusahaan.

Penagihan Proyek Termin I

Termin I yang disetujui oleh pemilik proyek sebesar 20 %.

Jumlah Penagihan:

Termin I	20% x Rp. 2.001.960.000	Rp.400.392.000
PPN	10% x Rp. 400.392.000	<u>Rp. 40.039.200</u>
		Rp.440.431.200
PPh pasal 23	2% x Rp.400.392.000	<u>Rp. 8.007.840</u>
		Rp.432.423.360

Jurnal :

Piutang Proyek	Rp.392.384.160
PPh ps 23	Rp. 8.007.840
Penagihan Proyek Dalam Proses	Rp.400.392.000

Untuk pencatatan Akun Piutang Proyek dan Akun Penagihan Proyek Dalam Proses yang dilakukan penulis diatas perlakuan dan pelaporannya sesuai dengan yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan pencatatan Akun PPh pasal 23 menurut analisa penulis diatas dilakukan saat penagihan karena pajak dikenakan

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh. Karena perusahaan memilih basis akrual maka pajak dikenakan saat diperoleh, saat yang dimaksud adalah saat penagihan. Sedangkan untuk pelaporan PPh pasal 23 ini sama dengan yang sudah dilakukan oleh perusahaan.

Pada saat Pelunasan Termin I

Jurnal :

Bank/Kas	Rp. 432.423.360
Piutang Proyek	Rp. 392.384.160
PPN Keluaran	Rp. 40.039.200

Akun Piutang Proyek disisi kredit merupakan pengurang Aktiva Lancar, dan dilaporkan ke dalam Neraca Tahun Berjalan. Akun PPN Keluaran yang dicatat oleh penulis adalah pada saat pembayaran atau pelunasan. Karena berdasarkan analisa penulis, PPN Terutang saat pembayaran mendahului penyerahan. Oleh karena itu dicatat saat pelunasan bukan saat penagihan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Untuk pelaporannya sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh perusahaan.

Pengakuan pendapatan dan laba laba kotor

Pendapatan yang diakui termin I:

Progress 29% x Rp. 2.001.960.000 Rp.580.568.400

HPP yang diakui termin I :

Progress 29% x Rp.1.457.703.640 Rp.421.804.640

Jurnal :

PDP	Rp. 158.763.760
HPP	Rp. 421.804.640
Pendapatan	Rp.580.568.400

Termin II

Pengeluaran Biaya Proyek

Sesuai dengan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Penagihan Proyek Termin II

Termin II yang disetujui oleh pemilik proyek sebesar 20 %.

Jumlah Penagihan:

Termin II	20% x Rp. 2.001.960.000	Rp.400.392.000
PPN	10% x Rp.400.392.000	<u>Rp. 40.039.200</u>
		Rp.440.431.200
PPh pasal 23	2% x Rp.400.392.000	<u>Rp. 8.007.840</u>
		Rp.432.423.360

Jurnal :

Piutang Proyek	Rp.392.384.160
PPh ps 23	Rp. 8.007.840
Penagihan Proyek Dalam Proses	Rp.400.392.000

Pada saat Pelunasan Termin II

Jurnal :

Bank/Kas	Rp. 432.423.360
Piutang Proyek	Rp. 392.384.160
PPN Keluaran	Rp. 40.039.200

Pengakuan pendapatan dan laba laba kotor

Pendapatan yang diakui termin II:

Progress	61% x Rp. 2.001.960.000	Rp.1.221.195.600
----------	-------------------------	------------------

Pendapatan yang diakui termin I:

Progress	29% x Rp. 2.001.960.000	<u>Rp.580.568.400</u>
		Rp.640.627.200

HPP yang diakui termin II :

Progress	61% x Rp.1.457.703.640	Rp.895.258.640
----------	------------------------	----------------

HPP yang diakui termin I :

Progress	29% x Rp.1.457.703.640	<u>Rp.421.804.640</u>
		Rp.473.454.000

Jurnal :

PDP	Rp. 167.173.200
HPP	Rp. 473.454.000
Pendapatan	Rp.640.627.200

Termin III**Pengeluaran Biaya Proyek**

Sesuai dengan pencatatan yang dilakukan perusahaan.

Penagihan Proyek Termin III

Termin III yang disetujui oleh pemilik proyek sebesar 30 %.

Jumlah Penagihan:

Termin III	30% x Rp. 2.001.960.000	Rp.600.588.000
PPN	10% x Rp.600.588.000	<u>Rp. 60.058.800</u>
		Rp. 660.646.800
PPh pasal 23	2% x Rp.600.588.000	<u>Rp. 12.011.760</u>
		Rp. 648.635.040

Jurnal :

Piutang Proyek	Rp.588.576.240
PPh ps 23	Rp. 12.011.760
Penagihan Proyek Dalam Proses	Rp.600.588.000

Pada saat Pelunasan Termin III

Jurnal :

Bank/Kas	Rp. 648.635.040
Piutang Proyek	Rp.588.576.240
PPN Keluaran	Rp. 60.058.800

Pengakuan pendapatan dan laba laba kotor

Pendapatan yang diakui termin III:

Progress	80% x Rp. 2.001.960.000	Rp.1.601.568.000
----------	-------------------------	------------------

Pendapatan yang diakui termin II:

Progress	61% x Rp. 2.001.960.000	<u>Rp.1.221.195.600</u>
		Rp. 380.372.400

HPP yang diakui termin III :

Progress	80% x Rp.1.457.703.640	Rp.1.165.351.640
----------	------------------------	------------------

HPP yang diakui termin II :

Progress	61% x Rp.1.457.703.640	<u>Rp. 895.258.640</u>
		Rp. 270.093.000
Jurnal :		
PDP		Rp. 110.279.400
HPP		Rp. 270.093.000
Pendapatan		Rp.380.372.400

Tahun 2003

Termin IV

Pengeluaran Biaya Proyek

Sesuai dengan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Penagihan Proyek Termin IV

Termin IV yang disetujui oleh pemilik proyek sebesar 30 %.

Jumlah Penagihan:

Termin IV	30% x Rp. 2.001.960.000	Rp.600.588.000
PPN	10% x Rp.600.588.000	<u>Rp. 60.058.800</u>
		Rp. 660.646.800
PPh pasal 23	2% x Rp.600.588.000	<u>Rp.12.011.760</u>
		Rp.648.635.040

Jurnal :

Piutang Proyek		Rp.588.576.240
PPh ps 23		Rp. 12.011.760
Penagihan Proyek Dalam Proses		Rp.600.588.000

Pada saat Pelunasan Termin IV

Jurnal :

Bank/Kas		Rp. 648.635.040
Piutang Proyek		Rp. 588.576.240
PPN Keluaran		Rp. 60.058.800

Pengakuan pendapatan dan laba laba kotor

Pendapatan yang diakui termin IV:

Progress 100% x Rp. 2.001.960.000 Rp.2.001.960.000

Pendapatan yang diakui termin III:

Progress 80% x Rp. 2.001.960.000 Rp.1.601.568.000
Rp.400.392.000

HPP yang diakui termin IV :

Progress 100% x Rp.1.457.703.640 Rp.1.457.703.640

HPP yang diakui termin III :

Progress 80% x Rp.1.457.703.640 Rp.1.165.351.640
Rp.292.352.000

Jurnal :

PDP	Rp. 108.040.000
HPP	Rp. 292.352.000
Pendapatan	Rp.400.392.000

Jurnal untuk mencatat penyelesaian proyek

Penagihan Proyek Dalam Proses	Rp.2.001.960.000
PDP	Rp.2.001.960.000

Saat timbulnya penghasilan adalah pada saat telah timbulnya hak untuk meminta pembayaran atau telah terjadi penerimaan tunai.

Dalam analisa dan pembahasan diatas penulis berpendapat bahwa pencatatan akuntansi dengan sistem pembukuan basis akrual didasarkan pada saat timbulnya hak untuk meminta pemenuhan perjanjian, dalam hal ini yang dimaksud adalah saat penagihan. Oleh karena itu seharusnya pada saat penagihan perusahaan sudah mengakui pendapatannya dan sebagai konsekwensinya saat itu pula timbul pajak yang harus dibayar dimuka atau PPh pasal 23.

Dalam penyelenggaraan pembukuannya, saat perusahaan memilih metode pembukuannya, perusahaan tersebut harus taat asas atau konsisten. Prinsip basis akuntansi akrual adalah pendapatan diakui saat diperoleh, walaupun belum ada pembayaran.

Berikut ini adalah Laporan Laba Rugi Proyek dan Neraca Proyek tahun 2002 dan 2003.

Tabel 4.7
PT. "X"
Laporan Laba Rugi
Proyek HDPE

(dalam Rp.)

	2002	2003	Total
Pendapatan	1.601.568.000	400.392.000	2.001.960.000
HPP	1.165.351.640	292.352.000	1.457.703.640
Laba	436.213.360	108.040.000	544.256.360

Sumber : data hasil olahan penulis

Keterangan :

Tahun 2002 (Lihat termin I s.d termin III)

- ◆ Pendapatan (580.568.400+640.627.200+380.372.400=1.601.568.000)
- ◆ HPP (421.804.640+473.454.000+270.093.000= 1.165.351.640)

Tahun 2003 (Lihat termin IV)

- ◆ Pendapatan = 400.392.000
- ◆ HPP =292.352.000

Tabel 4.8
PT “X”
Neraca
Proyek HDPE

(dalam Rp.)

AKTIVA		PASIVA	
Kas/Bank	207.992.920	Penagihan Proyek Dalam Proses	1.401.372.000
Pajak Dibayar dimuka	28.027.440	Laba Tahun Berjalan	236.020.360
PDP	1.601.568.000		
Total Aktiva	1.837.588.360	Total Pasiva	1.837.588.360

Sumber : data hasil olahan penulis

Keterangan :

- ◆ Kas/Bank(392.384.160-421.804.640-473.454.000+392.384.160-
270.093.000+588.576.240= 207.992.920)
- ◆ Pajak Dibayar Dimuka (PPh 23) (8.007.840 + 8.007.840 + 12.011.760 =
28.027.440)
- ◆ PDP (421.804.640 + 158.763.760 + 473.454.000 + 167.173.200 +
270.093.000 + 110.279.400=1.601.568.000)
- ◆ Laba Tahun Berjalan = Laba Tahun 2002
- ◆ Penagihan Proyek Dalam Proses (400.392.000 + 400.392.000 + 600.588.000
=1.401.372.000)

Tabel 4.9
PT “X”
Neraca
Proyek HDPE

(dalam Rp.)

AKTIVA		PASIVA	
Kas/Bank	504.217.160		
PDP	-	Laba Ditahan	436.216.360
Pajak Dibayar Dimuka	40.039.200	Laba Tahun Berjalan	108.040.000
Total Aktiva	544.256.360	Total Pasiva	544.256.360

Sumber : data hasil olahan penulis

Keterangan :

- ◆ Kas/Bank $((588.576.240 - 292.352.000 = 296.224.240) + \text{Kas/Bank tahun } 2002 (207.992.920) = 504.217.160)$
- ◆ Pajak Dibayar Dimuka (PPh 23) $(12.011.760 + \text{Pajak dibayar dimuka tahun } 2002 (28.027.440) = 40.039.200)$
- ◆ Laba Ditahan = Laba Tahun 2002
- ◆ Laba Tahun Berjalan = Laba Tahun 2003

4.3.2 Perbandingan Pengakuan Pendapatan Secara Akuntansi

Tabel 4.10
Perbandingan Pengakuan Pendapatan menurut perusahaan
dan menurut penulis
(dalam rupiah)

Keterangan	Menurut Perusahaan		Menurut Penulis	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit
<u>Termin I :</u>				
<u>Saat Penagihan</u>				
Piutang Proyek	440.431.200		392.384.160	
PPH ps 23			8.007.840	
Penagihan Proyek dalam Proses		400.392.000		400.392.000
PPN Keluaran		40.039.200		-
<u>Saat Pelunasan</u>				
Bank/Kas	432.423.360		432.423.360	
PPH ps 23	8.007.840		-	
PPN Keluaran	-			40.039.200
Piutang Proyek		440.431.200		392.384.160
<u>Saat Pengakuan Pendptn</u>				
PDP	158.763.760		158.763.760	
HPP	421.804.640		421.804.640	
Pendapatan		580.568.400		580.568.400
<u>Termin II :</u>				
<u>Saat Penagihan</u>				
Piutang Proyek	440.431.200		392.384.160	
PPH ps 23	-		8.007.840	
Penagihan Proyek dalam Proses		400.392.000		400.392.000
PPN Keluaran		40.039.200		-

<u>Saat Pelunasan</u>				
Bank/Kas	432.423.360		432.423.360	
PPH ps 23	8.007.840		-	
PPN Keluaran	-			40.039.200
Piutang Proyek		440.431.200		392.384.160
<u>Saat Pengakuan Pendptn</u>				
PDP	167.173.200		167.173.200	
HPP	473.454.000		473.454.000	
Pendapatan		640.627.200		640.627.200
<u>Termin III :</u>				
<u>Saat Penagihan</u>				
Piutang Proyek	660.646.800		588.576.240	
PPH ps 23	-		12.011.760	
Penagihan Proyek dalam Proses		600.588.000		600.588.000
PPN Keluaran		60.058.800		-
<u>Saat Pelunasan</u>				
Bank/Kas	648.635.040		648.635.040	
PPH ps 23	12.011.760		-	
PPN Keluaran	-			60.058.800
Piutang Proyek		660.646.800		588.576.240
<u>Saat Pengakuan Pendptn</u>				
PDP	110.279.400		110.279.400	
HPP	270.093.000		270.093.000	
Pendapatan		380.372.400		380.372.400
<u>Termin IV :</u>				
<u>Saat Penagihan</u>				
Piutang Proyek	660.646.800		588.576.240	
PPH ps 23	-		12.011.760	
Penagihan Proyek dalam Proses		600.588.000		600.588.000
PPN Keluaran		60.058.800		-

<u>Saat Pelunasan</u>				
Bank/Kas	648.635.040		648.635.040	
PPH ps 23	12.011.760		-	
PPN Keluaran	-			60.058.800
Piutang Proyek		660.646.800		588.576.240
<u>Saat Pengakuan Pendptn</u>				
PDP	108.040.000		108.040.000	
HPP	292.352.000		292.352.000	
Pendapatan		400.392.000		400.392.000
<u>Saat Penyelesaian Proyek</u>				
Penagihan Proyek	2.001.960.000		2.001.960.000	
Dalam Proses				
PDP		2.001.960.000		2.001.960.000

Sumber : data olahan penulis

Metode pengakuan pendapatan yang sesuai dengan kondisi perusahaan konstruksi adalah metode persentase penyelesaian. Karena metode ini dapat digunakan untuk kontrak jangka panjang maupun kontrak jangka pendek. Keuntungan dari metode ini adalah perusahaan dapat mengetahui kondisi laba setiap periodenya sehingga bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan.

Berdasarkan perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT “X” telah sesuai dengan PSAK No. 34 paragraph 23 tentang pengakuan pendapatan dan paragraph 28, yang menyatakan bahwa tahap penyelesaian suatu kontrak dapat ditentukan dalam berbagai cara.

Pada saat penyetoran PPN, perusahaan akan mencatat PPN Keluaran disisi debet dan PPN Masukan disisi kredit, sedangkan selisih antara PK dengan PM adalah PPN yang masih harus dibayar dicatat disisi kredit. PPN yang masih harus dibayar inilah yang nantinya dicatat dan dilaporkan ke dalam neraca pada tahun berjalan, masuk dalam akun kewajiban (*liabilities*) termasuk dalam hutang pajak. Dan pos ini (PPN yang masih harus dibayar) akan hilang pada saat terjadi pelunasan PPN Kurang Bayar. Karena PPN yang masih harus dibayar diperlakukan sebagai pelunasan utang, maka perusahaan mencatatnya PPN yang masih harus dibayar disisi debet sedangkan kreditnya adalah kas. PPN ini paling lambat disetor yaitu pada tanggal 15 setelah akhir masa pajak terjadinya transaksi dan paling lambat dilaporkan dalam bentuk SPT pada tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan ini sama dengan yang dilakukan penulis.

Sedangkan untuk PPh pasal 23nya, segera setelah timbulnya kewajiban Wajib Pajak untuk membayar uang muka PPh langsung dilaksanakan pemajakan. Kemudian pada akhir tahun pajak, setelah diketahui berapa sebenarnya jumlah seluruh penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak, baru timbul utang PPh atas seluruh jumlah penghasilan selama setahun tersebut, sehingga pada saat itu dapat diketahui berapa sebenarnya PPh terutang selama satu tahun pajak. Sedangkan uang muka PPh yang telah dibayar selama tahun berjalan dapat diperhitungkan atau dikreditkan dengan PPh Terutang tahunan tersebut. Karena hanya merupakan uang muka PPh, maka begitu timbul utang PPh yang

sesungguhnya pada akhir tahun pajak, kewajiban untuk membayar uang muka PPh yang timbul pada atau selama tahun berjalan itu secara otomatis akan hilang dan diganti dengan utang PPh yang sesungguhnya yang timbul pada akhir tahun. Jika tidak demikian maka pemajakan berganda akan terjadi.

4.3.3 Analisa Pengakuan Penghasilan menurut Perpajakan

Secara umum FSAB dalam SFAC no.5 mengemukakan kriteria pengakuan pendapatan yaitu pendapatan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi dan dihasilkan, sedangkan pengakuan pendapatan dan biaya kontrak menurut Standard Akuntansi Keuangan adalah bila hasil (*outcome*) kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi harus diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal neraca (*percentage of completion*).

Ketentuan pajak penghasilan menyatakan pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Istilah diterima terlihat lebih menunjuk kepada penerimaan atau realisasi penghasilan, sedangkan istilah diperoleh tampaknya menunjuk kepada pengakuan (rekognisi) penghasilan. Hak untuk menerima sejumlah imbalan (uang) dari pemberian jasa (atau dari penjualan barang) sudah diakui sebagai penghasilan menurut *accrual basis* karena terjadi realisasi transaksi. Saat pengakuan penghasilan yang dianut UU Perpajakan tidak selalu sama dengan saat pengakuan penghasilan menurut akuntansi.

PT "X" dalam pencatatannya secara perpajakan menganut sistem *accrual basis*, akan tetapi dalam prakteknya perusahaan mencatat PPh pasal 23nya pada saat adanya pelunasan untuk setiap termin. Saat timbulnya penghasilan adalah pada saat telah timbul hak untuk meminta pembayaran atau telah terjadi penerimaan uang tunai, kecuali dalam beberapa kasus UU PPh menentukan lain. Jadi saat timbulnya penghasilan tidak didasarkan pada apakah penghasilan itu sudah atau belum dicatat dalam pembukuan Wajib pajak (berdasarkan *cash basis* atau *accrual basis*) tetapi lebih didasarkan pada aspek yuridisnya yaitu pada saat timbulnya hak untuk meminta pembayaran atau pada saat terjadi penerimaan uang tunai manapun yang terjadi lebih dahulu.